

(Jurnal)

STRATEGI PEMERNTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI
ANAK JALANAN

(Studi Kasus : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2014)

Oleh : Beni Okto Priyadi

Intisari

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan atau anak yang hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Faktor yang mendasari munculnya anak jalanan dikarenakan factor ekonomi (kemiskinan), masalah keluarga dan factor lingkungan dimana dia tinggal sebelumnya. Anak jalanan yang seharusnya masih mendapatkan hak pendidikannya dan bermain selayaknya anak yang hidup normal seusianya, karena rata-rata anak jalan masih berusia dibawah umur. Tapi hal ini bertolak belakang dengan keadaan anak-anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya di Kota Yogyakarta. Masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan dan hak sebagaimana mestinya yang berkeliaran di sudut Kota Yogyakarta dan menghabiskan waktu di jalan.

SINOPSIS

Sesuai dengan Peraturan Menteri social RI Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, anak jalanan adalah termasuk bagian dari PMKS. Anak jalanan yang seharusnya masih mendapatkan hak pendidikannya dan bermain selayaknya anak yang hidup normal seusianya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Disini penulis mengangkat permasalahan dari judul “Strategi Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menangani anak Jalanan tahun 2011-2014”.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan secara sistematis dari situasi, pelayanan, program, penyediaan informasi tentang kondisi masyarakat atau gambaran mengenai sifat dan isu-isu tertentu. Untuk teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, observasi serta wawancara.

Setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan sudah cukup baik, terbukti di tahun 2011 sampai 2014 jumlah anak jalanan cenderung menurun. Namun dibalik keberhasilan mengurangi jumlah anak jalanan, Dinas Sosial dituntut tidak sekedar mengurangi jumlah anak jalanan tapi mengentaskan anak jalanan setuntas-tuntasnya dari Kota Yogyakarta.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, peneliti menyimpulkan, Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan di Kota Yogyakarta yaitu melalui Pendekatan personal terhadap anak jalanan dan mengacu pada Perda No 6 Tahun 2011 dan Pergub No 31 Tahun 2012. Solusi yang diberikan peneliti untuk aspek komunikasi dan sosialisasi peraturan lebih ditingkatkan lagi dan Perlunya menjalin kerja sama antara Kabupaten perbatasan yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul untuk melakukan pemasangan cctv ditempat-tempat yang di anggap rawan untuk melakukan aktifitas oleh anak jalanan atau ditempat keramaian, seperti : Malioboro dan perempatan-perempatan lampu merah, sehingga bisa terpantau langsung adanya anak jalanan. Cctv selain untuk memantau anak jalanan juga bisa memantau kemacetan, atau permasalahan lainnya sehingga masalah-masalah yang timbul cepat teratasi.

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Peraturan Menteri social RI Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, anak jalanan adalah termasuk bagian dari PMKS. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan atau anak yang hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Faktor yang mendasari munculnya anak jalanan dikarenakan factor ekonomi (kemiskinan), masalah keluarga dan factor lingkungan dimana dia tinggal sebelumnya. Anak jalanan yang seharusnya masih mendapatkan hak pendidikannya dan bermain selayaknya anak yang hidup normal seusianya, karena rata-rata anak jalan masih berusia dibawah umur. Tapi hal ini bertolak belakang dengan keadaan anak-anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya di Kota Yogyakarta. Masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan dan hak sebagaimana mestinya yang berkeliaran di sudut Kota Yogyakarta dan menghabiskan waktu di jalan. Dampak dari anak jalanan adalah mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas. Kota Yogyakarta yang di kenal dengan kota pendidikan dan pariwisata tentu tidak mau dicap menjadi kota yang tidak aman atau kotor dengan adanya anak jalanan. Sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – haknya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dengan masih adanya anak-anak jalanan di Kota Yogyakarta, hal ini pemerintah dituntut untuk mengentaskan

anak jalanan setuntas – tuntasnya dan memberikan hak dan perlindungan terhadap anak jalanan.

Permasalahan ini memicu muncul berbagai kebijakan yang diciptakan pemerintah. Kebijakan dan aturan hukum yang melandasi berbagai program tentang melindungi anak jalanan, Perda No 6 Tahun 2011 tentang perlindungan anak jalanan dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2013 tentang tata cara penjangkaun hingga pemenuhan hak anak yang hidup di jalanan. Kebijakan atau program ialah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Tabel 1.

Data Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

No	Tahun	Jumlah
1	2011	142
2	2012	214
3	2013	58
4	2014	54

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta 2015

Pada awal 2011, tercatat 142 anjal yang berkeliaran. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat pada tahun 2012 jumlah anak jalanan meningkat 50% dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 214 anak jalanan, sedangkan pada tahun 2013-2014 jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta cenderung menurun. Mengingat upaya yang dilakukan Dinsosnakertrans terus diperbaharui.

Adanya anak jalanan banyak memberikan dampak negatif pada diri anjal itu sendiri dan juga terhadap lingkungan. Keberadaan anjal dapat menyebabkan gangguan keamanan sehubungan dengan aktifitas mereka di jalanan. Kemungkinan anjal dijadikan sasaran peredaran narkoba cukup tinggi mengingat Indonesia saat sedang darurat narkoba dan sering dibarengi adanya seks bebas yang tentu akan rentan terhadap penyakit kelamin dan Aids. Hingga saat ini pemerintah belum menemukan cara tepat untuk mengentaskan anak jalanan karena membutuhkan sistem yang tepat untuk menangani anjal. Saat ini penanganan anjal dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka menarik untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melindungi anak jalanan di Kota Yogyakarta?

2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam melindungi anak jalanan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam melindungi anak jalanan di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor mendukung dan menghambat strategi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam melindungi anak jalanan di Kota Yogyakarta.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang lebih menitik beratkan untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu, bukan hanya mencari sebab-akibat dari fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian biasanya menjadi alasan dari pelaksanaan penelitian. Mohammad Natsir mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat atau melukiskan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.¹

Menurut Hadar Nawawi, metode deskriptif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.²

Selanjutnya Winarno Surachmad mengatakan bahwa ciri-ciri yang terdapat pada penelitian deskriptif, yaitu *pertama*, merumuskan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. *Kedua*, data-data yang dikumpulkan pertama-tama dijelaskan dan kemudian dianalisa.³

Pada akhirnya operasional penelitian deskriptif ini berkisar pada pengumpulan data yang selanjutnya disusun, diolah, ditafsirkan dan kemudian data yang telah diolah tersebut diberi makna rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan kritis.

2. Lokasi Penelitian

¹ Mohammad Natsir, 1983, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 105

² Hadari Nawawi, 1987, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, hlm. 63.

³ Winarno Surachmad, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Dasar Metode dan Teknik, Bandung, hlm. 132.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, dengan narasumber pejabat-pejabat dan staf kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu melihat anak jalanan yang terus ada disudut Kota Yogyakarta, juga Kota Yogyakarta yang terkenal dengan Kota pendidikan dan pariwisata yang seharusnya bersih dari anak jalanan.

3. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara ataupun observasi
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan meliputi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011 mengenai Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan, Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalanan dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis, Rencana Strategi dan Laporan Akuntabilitas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan cara-cara sebagai berikut :

- a. Observasi

Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung di lapangan yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti, yang berfungsi sebagai pedoman mencari permasalahan yang terjadi (pada implementasi kebijakan yang berlangsung sekarang)

b. Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung, tujuannya untuk mendapatkan informasi ataupun keterangan yang lebih jelas tentang Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Yogyakarta. Wawancara terhadap narasumber dan responden guna memperoleh keterangan atau gambaran-gambaran yang riil mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Adapun narasumber dalam kegiatan wawancara penelitian ini terdiri dari: Kepala Dinas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta atau perwakilannya, Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Anak jalanan.

c. Dokumentasi

Merupakan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literatur yang

dapat diperoleh dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

c. Analisis Data

Analisa data adalah: “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar“.⁴

Teknik analisa data yang di gunakan adalah analisa kualitatif. Di mana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kalimat, dipisah-pisahkan mengkategorikan untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta runtut menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen resmi dan sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam analisa data adalah sebagai berikut:

- a. Analisa data dalam bentuk menjalin proses pengamatan dengan penelitian lapangan.
- b. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan-perbedaan dengan gejala-gejala sosial yang diamati.
- c. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap perilaku yang berkaitan dengan proposisi-proposisi teoritis sementara.

⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal 103.

- d. Mengevaluasi proposisi-proposisi sementara untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.

Dari langkah-langkah yang seperti dijelaskan diatas, akan diambil satu kesimpulan yang dapat teruji kebenarannya, sehingga dapat diketahui hubungan sebab-sebab dan akibat dari beberapa data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

A. Analisis SWOT

SWOT kepanjangan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threat merupakan the performance audit yang selalu dibutuhkan oleh suatu organisasi. Strengths dan Weaknesses merupakan faktor internal, sedangkan Opportunities dan Threat merupakan faktor eksternal. Strengths (kekuatan) yang terkait dengan strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan.

Pada bab ini penulis akan mencoba menjelaskan apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman, atau yang lebih dikenal dengan analisis SWOT yang ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sehingga mempermudah bagi Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam proses perencanaan strategi yang dilakukan untuk menangani anak jalanan di Kota Yogyakarta.

Dalam proses perencanaan strategi salah satu langkah yang dilakukan adalah menyusun faktor penentu baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi.

B. Analisis Faktor Internal

1. Strengths (Kekuatan)

Melihat kinerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan sudah cukup baik, diawal tahun 2011 tercatat 142 anjal berkeliaran di Kota Yogyakarta dan ditahun 2012 jumlah anak jalanan

meningkat sekitar 50% yaitu 214 anjal, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 jumlah anak jalanan cenderung menurun, mengingat program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus diperbaharui. Tapi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya melindungi anak jalanan dituntut agar bisa mengentaskan anak jalanan setuntas-tuntasnya, tidak hanya mengurangi jumlah anak jalanan.

Tabel 2.1.
Data Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

No	Tahun	Jumlah
1	2011	142
2	2012	214
3	2013	58
4	2014	54

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta 2015

Dalam proses perencanaan strategi salah satu langkah yang dilakukan adalah menyusun faktor keberhasilan, yang dimulai dari kondisi, situasi, keadaan dan pengaruh-pengaruh yang ada dalam lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, yang mencakup kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam mewujudkan VISI organisasi dengan merumuskan tujuan, sasaran.

Beberapa faktor yang membuat peluang dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya Sarana dan Prasarana

Rumah singgah adalah bentuk penyedia sarana dan prasarana rumah bagi anak jalanan. Rumah singgah sebagaimana tertuang dalam petunjuk pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan adalah suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara, antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana pembelajaran anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat sendiri sudah biasa menerpakan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakatnya.

Tabel 2.2.

Sarana Rumah Singgah Anak Jalanan

No	Rumah Singgah	Pemilik	Kapasitas	Luas
1	Panti Anak Wiloso Projo	Pemerintah	50	216m ²
2	Ahmad Dahlan Jl. Sidobali UH II/396 Yogyakarta	Swasta Berdiri tahun 2001	30	180m ²
3	Anak Mandiri Jl.Perintis kemerdekaan no 33B	Swasta Berdiri tahun 1997	40	200m ²

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta 2015

Dari tabel 3.1 di atas dapat kita ketahui ada 3 rumah singgah yang di antaranya 1 kepemilikan di bawah pemerintah yaitu rumah anak Wiloso Projo yang berkapasitas 50 orang dengan luas 216m² , sedangkan 2 rumah singgah Ahmad Dahlan dan Anak Mandiri di bawah kepemilikan swasta, yang masing-masing rumah singgah dengan kapasitas 30 orang dan 40 orang.

b. Anggaran

Dukungan anggaran untuk rumah singgah yang ada di Kota Yogyakarta lebih banyak ditopang kehidupannya oleh Dinsos pemprov DIY. Untuk jumlah anggarannya yaitu sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya. Selain itu juga ada donatur dari perseorangan yang ikut membantu rumah singgah

walaupun tidak berkelanjutan setiap tahunnya yaitu sekitar 18.000.000 sampai 20.000.000 rupiah. Dengan anggaran yang ada dari Pemprov DIY dan donatur tidak tetap mereka mengelola rumah singgah dan anak-anak jalanan yang tinggal dirumah singgah tersebut.

Tabel 2.3.

Anggaran Penanganan dan Pembinaan Anak Jalanan Tahun 2015

No	Sumber	Jumlah
1	APBD Provinsi	25.000.000
2	Donatur	20.000.000

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta 2015

- c. Kesiapan Struktur Organisasi, Tata kerja dan Tupoksi Serta Adanya Peraturan di Bidang Sosial

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan sosial anak jalanan ini yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 31 tahun 2013 tentang tata cara penjangkauan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 telah menjelaskan mengenai tugas dan wewenang pemerintah dalam memberikan perlindungan anak yang hidup di jalan. Tujuan dari kebijakan perlindungan anak yang hidup di jalan sesuai

dengan isi Perda No 6 Tahun 2011 Bab I Pasal 3 adalah, (1) mengentaskan anak dari kehidupan di jalan, (2) menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan (3) memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sesusai wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 November 2015 dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kota Yogyakarta, menyebutkan “Selama ini yang menjadi tujuan kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta yaitu melindungi anak agar anak bertumbuh kembang dan perlindungan anak yang mengacu pada kepada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011”.

d. Adanya LSM Yang Peduli Anjal

Dalam menangani permasalahan PMKS khususnya anak jalanan, Dinsosnakertrans dibantu oleh organisasi non pemerintahan yaitu I-PSM dan Rumah Singgah. Menurut Kementerian Sosial RI, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan salah satu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dimana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk

menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Sedangkan arti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sendiri adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial (Kepmensos RI no. 46 28/HUK/1987), dengan kriteria telah mengikuti berbagai bimbingan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan sosial serta adanya minat untuk mengabdikan diri dan bekerja di bidang kesejahteraan sosial atas dasar sukarela.

FK-PSM sendiri resmi berdiri dengan adanya Surat 3 Keputusan Walikota No. 500 tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kota Yogyakarta. Dalam Keputusan Walikota No 500 tahun 2001 disebutkan, FK-PSM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan koordinasi, informasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dan peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial

- c. Memantapkan dan melembagakan usaha kesejahteraan sosial di wilayahnya, baik oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) maupun melalui kerjasama dengan pilar-pilar partisipan lainnya.

Tabel 2.4
Daftar Anak Binaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta
TAHUN 2013

N0	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tinggal	Tingkat Pendidikan
1	Dimas Budiyo	L	16 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	DO SMP
2	Muhammad Rifqi	L	15 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Kejar Paket B
3	Yuli Sugiyanto	L	15 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Kejar Paket B
4	Kamaluddin	L	15 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Tidak Sekolah
5	Muryanto	L	16 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Tidak Sekolah
6	Agus Kunadi	L	16 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	SMK
7	Agus Setyawan Sitepu	L	14 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	DO SMP
8	Dito Nurmansyah	L	16 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	SMK
9	Dede	L	16 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Tidak Sekolah
10	M. Ridwan	L	16 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	SMK
11	Aska	L	14 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	DO SMP
12	Sahirul Alim	L	15 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	DO SMP
13	Jova Rahul Nangin P	L	13 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	SD
14	Deni Abdulah	L	15 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	SD
15	Muh. Ardiansyah	L	15 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	SD
16	Roni Nur Fauzy	L	14 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	SMP
17	Dimas Rengga Khrisna	L	13 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	DO SMP
18	Haryanto	L	14 th	Warung boto Yk	SMP
19	Novita Indriyani	P	14 th	Jogoyudan Yogya	SMP
20	Apriyanto	L	15 th	Ketandan Yogya	DO SMP
21	Joko Susilo	L	14 th	Muja muju Yogya	DO SMP
22	Dewi Kurniasari Nur I	P	14 th	Giwangan Yogya	SMP
23	Ivan Pramudya	L	9 th	Banguntapan Bantul	SD
23	Randy Dananto	L	17 th	Pacitan Jatim	DO SMA

24	Dodik	L	12 th	Giwangan Yogya	SD
25	Putra Ragil	L	12 th	Seputaran Alun2 utara Yk	Tidak Sekolah
26	Fariz Baskoro	L	12 th	Bener, Tegalrejo Yk	SD
27	Galuh Putri	P	10 th	Gedongkiwo Yogyakarta	SD
28	Rivai	L	16 th	Terban Yogya	SMP
29	M. Iqbal	L	11 th	Seputaran Kraton Yk	Tidak Sekolah
30	Anton Kurniawan	L	16 th	Gedongkuning Yk	Kejar Paket B
31	Aditya	L	8 th	Seputaran Kraton Yk	Tidak Sekolah
32	Gilang	L	13 th	Gedongkiwo	SD
33	Yanti	P	11 th	Seputaran Alun2 utara YK	Tidak Sekolah
34	Mario Bende A	L	7 th	Ledok Timoho	SD
35	Moh. Farel A	L	11 th	Gondokusuman Yk	SD
36	Agustina Utami	P	13 th	Muja muju	SMP
37	Rino	L	8 th	Muja muju	SD
38	Hanafi	L	16 th	Ledokmacanan	Kejar Paket B
39	Diah	P	16 th	Badran	SMP
40	Nining	P	15 th	Badran Yogya	SMP
41	Pungkas	L	5 th	Ledok Timoho	Belum Sekolah
42	Agnes	P	15 th	Badran Yogya	Tidak Sekolah

Tabel 2.5
Daftar Anak Binaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta
TAHUN 2014

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tinggal	Tingkat Pendidikan	Identitas
1	Tri Wahyudi	L	12 th	Seputaran Alun Alun Utara	Putus Sekolah SD	Akte Kelahiran
2	Aditya Dwi saputra	L	10 th	Seputaran Alun Alun Utara	Putus Sekolah SD	Akte Kelahiran
3	Gilang	L	15 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan		Akte Kelahiran
4	Agus	L	15 th	Seputaran Alun Alun Utara	Belum pernah Sekolah	Blm Punya Identitas
5	Iqbal	L	12 th	Seputaran Alun Alun Utara	Putus Sekolah SD	Blm Punya Identitas
6	Nugie Nur S	L	8 th	Seputaran Alun Alun Utara	Belum pernah Sekolah	Blm Punya Identitas
7	Dewi Kurnia	P	17 th	Giwangan Umbulharjo Yk	Sekolah SMK	Akte Kelahiran
8	Rino	L	8 th	Muja Muju Umbulharjo Yk	Putus Sekolah SD	Blm Punya Identitas
9	Dede	L	20 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Belum pernah Sekolah	KTP
10	Fikriyanto	L	16 th	Sorosutan Umbulharjo Yk	Putus Sekolah SMP	Blm Punya Identitas
11	Anisa Dewi	P	10 th	Baciro Yogyakarta	Sekolah SD	Akte Kelahiran
12	Hudiana F	P	10 th	Tegalrejo Yogyakarta	Sekolah SD	Akte Kelahiran
13	Bintang Rachman	L	11 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Sekolah SD	Akte Kelahiran
14	Aska	L	17 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Putus Sekolah SMP	Akte Kelahiran
15	Didit	L	18 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Putus Sekolah SMP	KTP
16	Ananda Augusta	L	8 th	Giwangan Umbulharjo Yk	Sekolah SD	Akte Kelahiran

17	Ivan Pramudya	L	12 th	Banguntapan Bantul	Sekolah SD	Akte Kelahiran
18	Mario Bende	L	9 th	Ledok Timoho	Sekolah SD	Blm Punya Identitas
19	Abednego	L	13 th	Jogokariyan Yk	Putus Sekolah SD	Akte Kelahiran
20	Agus Setiawan	L	17 th	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Putus Sekolah SMP	Akte Kelahiran

Dari table 2.4 dan table 2.5 adalah daftar dari hasil penjangkauan yang dilakukan oleh rumah singgah Ahmad Dahlan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2013 dan 2014. Rumah singgah yang beralamat di Jl. Sidobali UH II/396 Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 2001. Secara umum, anak-anak asuh yang berada dirumah singgah Ahmad Dahlan karena factor ekonomi. Namun tidak hanya itu saja, factor lain juga turut serta didalamnya, diantaranya yaitu : yatim, piatu, yatim piatu, broken home. Selanjutnya anak-anak penghuni rumah singgah Ahmad Dahlan akan diberikan pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal ini adalah pendidikan sekoalah, dimana pihak rumah singgah, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyekolahkan anak-anak penghuni rumah singgah bagi yang mau sekolah lagi. Sedngkan pendidikan non formal adalah pendidikan diluar sekoalah, seperti : 1) pengajian-pengajian, baik dimasjid kampung maupun dirumah singgah sendiri. 2) kegiatan pengembangan pribadi, seperti pendidikan ahklak, mengaji dan beribadah yang diberikan oleh pengelola rumah singgah Ahmad Dahlan.

2. Weaknesess (Kelemahan)

a. Sumber Daya Manusia Yang Belum Maksimal

Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal yang ada di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta belum sesuai, dimana jumlah pegawai lulusan SMA/sederajat sebesar 43% dari total keseluruhan jumlah pegawai yang ada. Hal ini berdampak terhadap ketidak efektifian dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada, walaupun tidak selamanya ukuran kinerja di lihat dari tingkat pendidikan.

Tabel 2.6

Pegawai Dinas Sosial Kota Yogyakarta menurut Tingkat Pendidikan

No	Kepangkatan/Golongan	Jumlah	%
1	Magister / S2	4	3
2	Sarjana / S1	55	45
3	Sarjana Muda / D3	12	10
4	SMA / sederajat	41	34
5	SMP / sederajat	8	7
6	SD / sederajat	2	2
	Jumlah	122	100

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2012-2016

b. Anggaran Yang Terbatas

Anggaran yang di anggarkan oleh Dinas Sosial Provinsi untuk rumah singgah yang menangani anak jalanan sebesar 25.000.000 per

tahun, dirasa belum sepenuhnya bias mengoptimalkan kegiatan rumah singgah. Rumah singgah rata-rata per tahun manampung sekitar 20 sampai 40 anak jalanan, jika dibikin per anak menghabiskan 20.000 perhari untuk biaya makan, maka dengan 20 anak sebesar 400.000 perhari, dengan anggaran yang ada rumah singgah hanya bias mempergunakan anggaran dalam kurun waktu sekitar 2bulan.

C. Analisa Fakator Eksternal

a.Peluang

Analisis lingkungan eksternal ini terdiri dari peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya Kejelasan Program Untuk Menangani Anak Jalanan

Kebijakan perlindungan anak jalanan sesuai dengan perda No 6 Tahun 2011 (pasal 3) menyebutkan bahwa perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk mengentaskan anak dari kehidupan di jalan, menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan perlindungan dari kriminal, eksploitasi dan kekerasan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tetapi dalam faktanya pemenuhan hak-hak

anak seperti yang diamatkan dalam Perda No 6 Tahun 2011 (pasal 15) belum berjalan secara optimal. Hak-hak anak tersebut yaitu:

- a. Hak atas pengasuhan
- b. Hak atas kebutuhan dasar
- c. Hak kesehatan
- d. Hak pendidikan
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

2. Terbukanya Peluang Kerja Sama Dengan Berbagai Pihak

Dalam menjalankan program-program penangan anak jalanan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang secara sukarela atau terorganisir diantaranya adalah masyarakat umum, Rumah Singgah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan I-PSM (Ikatan Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat).

b. Ancaman

Beberapa tantangan yang masih harus dihadapi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta , antara lain :

- 1) Meningkatnya gangguan keamanan

Ancaman dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan adalah adanya gangguan keamanan terhadap anak jalanan dari para preman maupun orang yang mengeksploitasi anak jalanan.

2) Terjadi trafiking, seks bebas.

Meningkatnya trafiking dan seks bebas di Yogyakarta dapat mengancam upaya perlindungan anak jalanan. Penjualan anak jalanan dan gaya hidup modern dapat menyebabkan anak jalanan terjerumus dalam seks bebas di kalangan anak jalanan.

3) Meningkatnya peredaran Narkoba

Kehidupan bebas anak jalanan dapat menyebabkan pengaruh lingkungan terhadap obat terlarang atau narkoba di lingkungan anak jalanan mengingat saat ini Indonesia sedang darurat Narkoba.

D. Identifikasi Isu-isu Strategi

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dapat dijelaskan dari hasil analisis lingkungan di atas dan tuntutan perubahan yang begitu cepat. Isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan permasalahan sosial yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Permasalahan kemiskinan adalah merupakan permasalahan yang terdapat di beberapa kota besar, demikian juga dengan Kota

Yogyakarta tidak terlepas dari permasalahan ini. Kemiskinan kota pada umumnya terfokus pada wilayah yang dibangun pada lahan marjinal atau memanfaatkan lahan kosong secara illegal. Hal ini karena mereka tidak memiliki pilihan lain sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal warga miskin umumnya tidak tertata dengan baik sehingga menimbulkan kawasan kurang layak huni. Selain masalah tempat tinggal juga masalah mental keagamaan mereka masih rendah. Dalam penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran diperlukan pendataan warga miskin. Penanganan pengentasan tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapi melibatkan semua SKPD sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial hanya berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 1 kepala seksi, dan 4 staf yang terjun ke lapangan. Sedangkan pelayanan Rahabilitas dan Pelayanan Sosial tidak hanya menangani anak jalanan.

Ya kan mas bisa liat sendiri disini, hanya ada 5 orang di seksi ini, padahal tugas pokok dan fungsi yang kita laksanakan banyak sub, dengan hanya staf yang berjumlah 4 kita mengangani kegiatan pemberdayaan dan rehabilitasi masalah sosial.⁵

Dari hasil wawancara ini bahwa jumlah staf yang ada di level dinas masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk

⁵ Wawancara dengan Ibu Nani selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan pelayanan Sosial di Dinas Sosial Kota Yogyakarta tanggal 25 November 2015

menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif.

2. Aspek Operasional

Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pengangkatan birokrat dilakukan secara terbuka dengan menggunakan tes seleksi secara tertulis. Pengangkatan dan pemilihan personil struktural di Dinsosnakertrans dilakukan oleh pemerintah dengan mekanisme penerimaan PNS sesuai Undang-undang. Sedangkan rekrutmen pengurus di I-PSM merupakan kepedulian masyarakat sendiri, dimana masyarakat yang aktif di organisasi Kelurahan, akan diajukan ke I-PSM Kecamatan/Kota dan untuk Ketua I-PSM dipilih secara kesepakatan bersama dimana masing-masing Kecamatan/Kota mengajukan bakal calon ketua. Untuk Rumah Singgah Ahmad Dahlan rekrutmen pengurus merupakan wewenang yayasan rumah singgah itu sendiri.

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini

dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

E. Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta Dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Merujuk pada hasil identifikasi masalah di atas, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah merumuskan beberapa strategi penanganan anak jalanan, yaitu :

1. Pendekatan baru untuk menangani anak jalanan, yaitu mengganti metode razia menjadi pendekatan personal terhadap anak jalanan
2. Mengacu pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 dan Pergub No 31 Tahun 2012
3. Bekerja sama dengan lembaga swasta yaitu rumah singgah dan IPSM, dan
4. Melakukan pembinaan terhadap anak jalan.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 November 2015 dengan Ibu Nani selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kota Yogyakarta, menyebutkan “Selama ini yang menjadi tujuan kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta yaitu melindungi anak agar anak bertumbuh kembang dan perlindungan anak yang mengacu pada kepada Peraturan Daerah No 6 tahun 2011.”⁶

⁶ Wawancara dengan Ibu Nani tanggal 25 November 2015.

Sedangkan sasaran kebijakan perlindungan anak yang hidup di jalan khusus di Kota Yogyakarta, menurut Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kota Yogyakarta, yaitu “Anak yang hidup di jalan yang masih berhubungan dengan orangtua, anak yang hidup di jalanan tidak berhubungan dengan orangtua, anak yang rentan untuk turun di jalan, orang tua anak jalanan.”

Berdasarkan wawancara diatas dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya untuk menangani permasalahan anak jalanan di kota Yogyakarta dengan tujuan dan sasaran sebagaimana mestinya.

Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan Bab II Pasal 4 menyebutkan bahwa tugas pemerintah daerah adalah:

- 1) Melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta. Sesuai pengamatan yang dilakukan saat melakukan penelitian di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan kota yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Pemerintah Daerah juga melakukan kerjasama dengan Rumah Singgah yang berada di Yogyakarta serta dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM).
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan. Melalui dana APBD pemerintah

menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan.

- 3) Memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada tanggal 25 November 2015, menyebutkan bahwa Dalam hal pemenuhan hak identitas untuk anak jalanan asli Kota Yogyakarta sudah memiliki identitas, selama masih ada orangtua. Sedangkan yang tidak memiliki Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta akan berkerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Catatan Sipil. Begitu juga dengan Hak kesehatan dan Pendidikan, Dinsosnakertrans bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedangkan hak atas kebutuhan dasar, anak-anak jalanan yang berada di rumah-rumah singgah dan panti-panti telah disediakan. Dan untuk anak jalanan yang berhadapan dengan hukum langsung di rujuk ke Dinas Sosial Provinsi.
- 4) Melaksanakan pendataan anak yang hidup di jalan. Dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dibantu oleh I-PSM, rumah-rumah singgah dan panti-panti untuk melaksanakan pendataan.
- 5) Memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan yaitu Dinas Sosial sendiri berkerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Hal ini dapat terlihat dari Instansi terkait yaitu Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial

mengenai permasalahan anak jalanan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Kerja di Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pembinaan Anak Jalanan dalam Kota Yogyakarta, dimana sasaran kegiatan tersebut adalah anak jalanan, dengan *output* atau hasil yang diharapkan adalah meningkatnya keterampilan anak jalanan. Dalam kegiatan ini Dinsosnakertrans berkerja sama dengan I-PSM Kota Yogyakarta.
- 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan. Kegiatan ini dilakukan di 14 Kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta dengan sasaran masyarakat dan Anak Jalanan. Dalam kegiatan ini Dinsosnakertrans bekerja sama dengan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta dan I-PSM Kota Yogyakarta.
- 3) Pendekatan Anak Jalanan, dengan sasaran anak jalanan. *Output* atau hasil yang diharapkan yaitu teridentifikasinya masalah dan munculnya efek jera bagi anak jalanan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Kegiatan ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta berkerja sama dengan Dintib Kota Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta dan I-PSM Kota Yogyakarta.
- 4) Melakukan pemasangan Papan Hibauan Masalah Anak Jalanan, dalam kegiatan ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta berkerja sama dengan I-PSM Kota Yogyakarta. Papan Hibauan ini dipasang di titik-titik strategis di Kota Yogyakarta, harapannya dengan adanya papan hibauan

masyarakat mampu ikut serta dalam penanganan permasalahan anak jalanan

Tabel 3.5.

Titik Pemasangan Papan Himbauan Anak Jalanan

No	Lokasi	Penempatan Gambar	Arah pandang Gambar
1.	Perempatan Duta Wacana	Jl. Trimu utara jalan sebelah barat traffic light	Mengarah ke barat
2.	Perempatan Demangan	a. Di Jl. Gejayan sebelah timur jalan, utara traffic light 50 m dekat rambu perhubungan a. Di Jl. Solo sebelah selatan jalan, sebelah timur traffic light lb kurang 100m	a. Mengarah ke barat b. Timur Utara (menyesuaikan lokasi)
3.	Perempatan Galleria Mall	Di Jl. Prof. Yohanes sebelah timur jln, lb kurang 60 m dari traffic light	Mengarah Barat (menyesuaikan lokasi)
4.	Perempatan Korem	Di Jl. Cik Ditiro dari arah utara ditengah taman sebelah utara tiang lampu penerangan jln	Mengarah utara
5.	Perempatan STM Jetis	Di Jl. A.M Sangaji sebelah barat jln. Lh. Kurang 80 m dari traffic light dekat lampu penerangan jalan	Timur utara/ timur laut
6	Perempatan Wirobrajan	Jl. Wates Kurang 80 m dari traffic light dekat lampu penerangan jalan	Mengarah utara

Sedangkan di Kawasan Malioboro peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan. Mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang isi perda tersebut “saya tidak

tahu kalau ada larangan memberi bantuan kepada anak jalanan, soalnya kasihan kalau tidak dikasih, kalau pas ada uang receh yaa saya ngasih uang ke anak jalanan tapi kalau pas gak ada ya tidak dikasih”.

Upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial khususnya permasalahan anak jalanan. Anak jalanan merupakan sebuah realita sosial dimana masih banyak anak yang terlantar, bekerja, mengemis, atau menggelandang di jalan.

Kebijakan perlindungan anak jalanan sesuai dengan perda No 6 Tahun 2011 (pasal 3) menyebutkan bahwa perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk mengentaskan anak dari kehidupan di jalan, menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan perlindungan dari kriminalisasi, eksploitasi dan kekerasan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tetapi dalam faktanya pemenuhan hak-hak anak seperti yang diamatkan dalam Perda No 6 Tahun 2011 (pasal 15) belum berjalan secara optimal. Hak-hak anak tersebut yaitu:

- a. Hak identitas
- b. Hak atas pengasuhan
- c. Hak atas kebutuhan dasar

d. Hak kesehatan

e. Hak pendidikan

f. Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Kebijakan perlindungan anak jalanan tidak selalu berjalan lancar. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Terdapat banyak permasalahan yang dialami baik berasal dari internal lembaga maupun dari eksternal lembaga, sehingga akan menghambat jalannya implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta.

A. Hambatan dari internal lembaga terdiri dari:

- 1) Keterbatasan SDM dan Sumber Anggaran, sehingga menyebabkan program yang terealisasi masih belum optimal.
- 2) Sosialisasi yang dilakukan masih kurang, karena masih banyak masyarakat dan anak jalanan yang belum mengetahui mengenai adanya kebijakan perlindungan anak jalanan.

B. Hambatan dari eksternal lembaga terdiri dari:

- 1) Faktor Lokasi, letak strategis Yogyakarta dan mudah dijangkau menyebabkan anak menjadi nyaman berada di Kota Yogyakarta
- 2) Faktor Lingkungan, anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi.

- 3) Faktor Keluarga, terdapat orangtua yang mengajak atau membiarkan anaknya melakukan aktifitas ekonomi di jalan seperti mengamen dan mengemis.

Akibat hambatan-hambatan yang terdapat dalam kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam mengatasi hambatan, yaitu melakukan pendekatan dengan keluarga serta penyadaran. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta berkerja sama dengan I-PSM Kota melaksanakan kegiatan pemasangan papan-papan himbauan larangan memberikan bantuan kepada anak jalanan di jalan yang terdapat di berbagai titik strategis yang berada di Kota Yogyakarta, dengan harapan masyarakat dapat membantu program pengentasan anak jalanan. Himbauan dapat mengurangi jumlah anak jalanan yang melakukan aktifitas di jalanan, jika tidak ada yang memberi bantuan di jalanan, tentunya anak jalanan tidak akan melakukan aktivitas di jalanan. Dengan memberikan bantuan di jalanan justru menyebabkan banyak anak jalanan yang merasa termanjakan dan berlama-lama melakukan kegiatan ataupun rutinitas mereka sebagai pengamen atau pengemis di beberapa titik strategis seperti di lampu lalu lintas maupun di pusat keramaian.

F. Menciptakan Visi dan Misi Organisasi Yang Efektif Bagi Masa Depan.

1. Visi Organisasi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan “.

2. Misi Organisasi

Adapun program yang dilaksanakan terkait misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan:

- a) Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial
- b) Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian bagi Pemegang KTP dan KIA
- c) Peningkatan dan Pelayanan Pembinaan PMKS
- d) Pelayanan Anak Terlantar
- e) Pelayanan Gepeng di Panti
- f) Pendataan PMKS dan PSKS
- g) Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial
- h) Pemberdayaan Fakir Miskin

Sementara itu dari Program Pemberdayaan Sosial memiliki kegiatan :

- a) Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
- b) Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Saat ini kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta cukup baik dalam hal menangani anak jalanan, terbukti sepanjang tahun 2011 sampai 2014 jumlah anak jalanan mengalami penurunan yang sangat drastis, salah satu faktor adalah dengan menerapkan beberapa macam strategi, antara lain :

1. Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta yaitu melalui Pendekatan personal terhadap anak jalanan dan mengacu pada Perda No 6 Tahun 2011 dan Pergub No 31 Tahun 2012. Serta , peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan. Dalam mewujudkan strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan RSAD dengan melakukan penjangkauan langsung di jalan, serta bekerjasama dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM) serta Komunitas yang menangani anak jalanan yang berada di seputaran Kota Yogyakarta dengan menghambat laju pertumbuhan anjal di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Hambatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta yaitu hambatan dari

internal lembaga terdiri dari Keterbatasan SDM, sosialisasi yang dilakukan masih kurang, sedangkan hambatan dari eksternal lembaga terdiri dari faktor Lokasi, letak strategis Yogyakarta dan lingkungan yang ramah menyebabkan anak menjadi nyaman berada di Kota Yogyakarta .

B. Saran

1. Perlunya peningkatan intensitas sosialisasi yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta. Perlunya menjali kerja sama antara Kabupaten perbatasan yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul untuk melakukan pemasangan cctv ditempat-tempat yang di anggap rawan untuk melakukan aktifitas oleh anak jalanan atau ditempat keramaian, seperti : Malioboro dan perempatan-perempatan lampu merah, sehingga bisa terpantau langsung adanya anak jalanan. Cctv selain untuk memantau anak jalanan juga bisa memantau kemacetan, atau permasalahan lainnya sehingga masalah-masalah yang timbul cepat teratasi.
2. Secara teoritis, fokus utama pada anak jalanan adalah pada perlindungan sosial (*social protection*). Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anjal dan gepeng bukan sekadar menghapus mereka dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan. Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan *right-based initiatives*; yakni

memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar sesuai dengan aspirasi terbaik mereka.

3. Penggalakan lembaga-lembaga penampung anak jalanan, gelandangan, penegemis dan pengamen. Pemerintah juga perlu mendirikan lembaga-lembaga penampung seperti halnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun instansi lainnya. Lembaga tersebut dapat dijadikan sebagai wadah untuk menampung anjal, gepeng, dan pengamen untuk mengasah keterampilan dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih produktif dan ekonomis.
4. Perlunya memberikan motivasi secara inten dan memeberikan pegeritian betapa pentingnya pendidikan, agar anak-anak jalanan mau kembali sekolah. Karena mereka adalah asset bangsa yang tak ternilai harganya juga penerus-penerus bangsa. Mereka yang seharusnya duduk dibangku sekolah karrena himpitan ekonomi mereka harus turun kejalanan untuk menyambung hidup mereka padahal sebagai anak bangsa mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah.

Daftar Pustaka

Lexy Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Mohammad Natsir, 1983, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nachrowi D. Nachrowi dan Salahudin A. Muhidin, 1997. *Pekerja Anak dan Pembangunan Keluarga*, Lembaga Demografi FE UI, Jakarta

Wawancara dengan Ibu Nani selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan pelayanan Sosial di Dinas Sosial Kota Yogyakarta tanggal 25 November 2015

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri social RI Nomor 08 tahun 2012

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011 mengenai Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalanan

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandan dan Pengem

